

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk terbesar ke empat di dunia. Memiliki populasi penduduk yang sangat besar membuat indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang,rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari.Menurut Suryawati (2005: 122) Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat atau keluarga yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai bantuan sosial atau

(bansos).bansos ini dalam bentuk bantuan tunai maupun material. Bansos diantaranya adalah seperti dana BOS,jamkesmas, PNPM-Mandiri, raskin, Bantuan Langsung tunai, Program keluarga harapan dan lain-lain.

Kebijakan program bantuan sosial di indonesia menjadi sangat penting, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang dasar republik indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban atau bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Bantuan sosial adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif, mandiri,sejahtera dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang sudah ada. Pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin. Untuk memberikan keabsahan sistem perlindungan di indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, cukup jelas tercatat dalam bab 1 (pasal 1) perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program keluarga harapan (PKH). Program keluarga harapan adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Sebagai imbalanya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama program keluarga harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang telah melaksanakan PKH sejak tahun 2013 di 21 kecamatan. Pelaksanaan PKH di kota Bandung dilaksanakan oleh pelaksana program keluarga harapan kecamatan di bawah pengawasan dari Unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) kota Bandung. Pelaksana PKH kecamatan merupakan pihak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat melakukan validasi data PPLS 2019 yang sebelumnya sudah diolah oleh tim Nasional percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) di mana di dalam data tersebut terdapat nama-nama keluarga Miskin sebagai sasaran PKH. Data PPLS 2019 adalah data kemiskinan mikro yang memiliki kelebihan dengan menyajikan data kemiskinan penduduk. Adapun data rumah tangga miskin per-kecamatan di kota Bandung menurut data PPLS 2019 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Rumah Tangga Miskin di Kota Bandung**

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN (RTM)	PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
1.	Bojongloa kaler	6975	664
2.	Kiara condong	5193	446
3.	Ujung berung	3845	863
4.	Sukajadi	3263	339
5.	Bojongloa kidul	3702	585
6.	Andir	2163	372
7.	Astana anyar	2264	303

*Sumber: Data sekunder BPS, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah Keluarga miskin terbanyak terdapat di kecamatan bojongloa kaler yaitu sebanyak 6.975 keluarga miskin dan 664 jumlah keluarga penerima manfaat. Dari total jumlah keluarga miskin di kota bandung (79.573).

Kota bandung merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang banyak tentunya tidak lepas dari permasalahan kemiskinan. Kelurahan ciroyom kecamatan andir kota bandung yang merupakan satu dari beberapa kelurahan kota bandung yang mengalami permasalahan kemiskinan. Kelurahan ciroyom memiliki penduduk 19.049 jiwa dari total keseluruhan penduduk

kelurahan ciroyom ternyata masih banyak kepala keluarga yang berada pada tataran ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan data dari kelurahan ciroyom saat ini total keseluruhan masyarakat miskin yakni sebanyak 2163 jiwa.

Mata pencaharian mereka sebagai Pedagang, PKL, tukang becak, tukang parkir, dan buruh pabrik ada juga yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Untuk keadaan ekonomi di Kelurahan Ciroyom kecamatan andir bisa dikatakan rendah karena mereka menggantungkan hidupnya dari berdagang sebagai pedagang yang membuka usaha warung di rumah, pedagang kaki lima, buruh pasar, tukang becak, tukang parkir dan sebagai kuli bangunan tentu itu bukan hal mudah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengingat pendapatan yang di terima kecilumumnya pada tingkat perkotaan. Masyarakat miskin rela mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi mereka yang memiliki uang dan memegang kendali atas sektor perekonomian lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit. Bahkan yang lebih parah, kemiskinan telah membuat masyarakat kita terjebak dalam budaya memalaskan, budaya mengemis, dan menggantungkan harapannya dari budi baik pemerintah melalui pemberian bantuan. Masalah yang terjadi yaitu mengenai kelayakan peserta bantuan program keluarga harapan. Pada dasarnya program ini dikhususkan kepada masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin.

Tetapi yang terjadi, masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta program keluarga harapan yang dinilai tidak termasuk keluarga miskin, sementara pada saat bersamaan ada masyarakat yang dinilai keluarga kurang

mampu sudah tereleminisi sebagai peserta program keluarga harapan. Artinya, penentuan prioritas sasaran peserta program keluarga harapan belum tepat sasaran. Program keluarga harapan belum mencakup semua masyarakat miskin yang ada di kelurahan ciroyom.

Pengadaan program keluarga harapan adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Maka program keluarga harapan diharapkan lebih optimal, hingga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari program ini dapat terwujud. pelaksanaan program untuk menanggulangi kemiskinan harusnya berjalan secara merata, agar supaya masyarakat dapat melihat dan mengetahui bahwa program untuk masyarakat miskin itu ada dan dapat menjadi jalan keluar untuk masalah yang dihadapi.

Pelaksanaan atau penerapan yang baik akan berdampak pada hasil dari program yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan yang baik dari program keluarga harapan diharapkan juga mampu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat miskin di bidang pendidikan dan kesehatan.

Berkaitan dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana Pelaksanaan bantuan sosial yang ada di kelurahan ciroyom, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH) bagi Keluarga miskin penerima manfaat di Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) bagi Keluarga miskin penerima manfaat di kelurahan ciroyom kecamatan andir ,maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga Miskin penerima manfaat di Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir kota Bandung. kemudian dapat diidentifikasi focus permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan aspek pendidikan, Kesehatan dan peningkatan status Sosial ekonomi program keluarga harapan bagi Keluarga Miskin penerima manfaat di kelurahan ciroyom Kota Bandung
- 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan PKH di kelurahan ciroyom kota bandung
- 3) Bagaimana hasil pelaksanaan aspek pendidiakan, Kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin penerima manfaat di kelurahan ciroyom kota bandung

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program keluarga harapan di kelurahan ciroyom, kecamatan andir , kota bandung
- 2) Untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat pelaksanaan PKH di kelurahan ciroyom kota bandung

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pelaksanaan PKH di kelurahan ciroyom, kecamatan andir, kota bandung

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- 1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang pekerjaan sosial serta dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan program berikutnya.
- 2) Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah daerah kota bandung dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan PKH, dapat pula dijadikan sebagai masukan bagi pihak dinas sosial kota bandung untuk meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan PKH.